



# ANALISA

24 Desember 2025

Vol. 0008

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

## The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Ilustrasi Gemini AI



**Hadi Prayitno**

Direktur Eksekutif  
The Reform Initiative  
(TRI)

## Belajar dari Bencana Sumatera

*Bencana di Indonesia beberapa tahun terakhir didominasi Banjir, longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi. Sagala dkk. (2025) dalam policy brief yang diterbitkan Resilience Development Initiative (RDI) awal Desember 2025 menyebutkan bahwa 99 persen bencana tahunan bertipe hidrometeorologi. Angka tersebut sebagai penanda bahwa risiko bencana bersifat struktural: ancaman lahir dari cuaca ekstrem yang tidak mudah diprediksi oleh masyarakat awam, bertemu dengan perubahan tata guna lahan, kepadatan permukiman, dan kerentanan infrastruktur dasar.*

Peristiwa yang dipicu Siklon Senyar memberi pelajaran yang lebih tajam. Dokumen RDI mencatat peringatan dini yang diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah disampaikan 8 hari sebelum bencana. Persoalan utama bukan semata keterlambatan mengetahui bahaya, melainkan kesenjangan antara peringatan (warning) dan aksi (action). Ketika peringatan tidak otomatis terkonversi menjadi keputusan operasional, rumah tangga, pelaku usaha, dan layanan publik tetap berada pada posisi paling rentan, sekalipun sains dan data sudah tersedia.

### **Peringatan Awal, Aksi Tertinggal**

Laporan RDI mengidentifikasi hambatan yang bersifat kelembagaan. Ketidakjelasan informasi tanda-tanda pemicu siklon dan tidak adanya rencana darurat khusus (contingency plan). Tanpa informasi pemicu yang jelas seperti ambang curah hujan, status peringatan tertentu, atau indikator dampak yang otomatis mengaktifkan rencana kontinjensi, komando lapangan mudah terjebak pada penantian tanpa kepastian. Akibatnya, waktu paling menentukan (golden time) untuk menurunkan risiko habis sebelum tindakan kolektif terbentuk.

Kondisi tersebut dapat diperparah oleh kontroversi prosedural yang mengalihkan fokus dari kebutuhan lapangan. Keraguan-raguan pemerintah untuk menyatakan Siklon Senyar sebagai bencana nasional menjadi salah satu titik kritik publik. Terlepas dari perdebatan status, masyarakat membutuhkan keputusan cepat, mandat kerja yang jelas, dan koordinasi lintas aktor yang dapat diuji secara sederhana: siapa melakukan apa, kapan, dengan sumber daya apa, dan untuk menurunkan dampak apa.

Kesenjangan antara peringatan awal dengan aksi lapangan juga terjadi pada kanal komunikasi. Informasi bencana dipimpin oleh berita yang bersumber dari sosial media dalam waktu amat cepat. Pemberitahuan resmi alat negara tercecer jauh di belakang, sangat lambat datangnya. Masa kritis awal bencana, publik dipaksa mengunyah simpang siur informasi yang memicu cemas dan ketidakpastian yang tinggi. Erokhin dan Komendantova (2024) menjelaskan mengapa dinamika ini krusial, karena sosial menawarkan pengumpulan data skala besar secara cepat dan mutakhir (real-time) sehingga memaksa pendekatan penanganan bencana berubah dan menyesuaikan diri.

Tidak dapat disangkal, informasi warga melalui media sosial dapat mempercepat pemetaan kebutuhan dan situasi lapangan, namun tanpa tata kelola komunikasi yang teratur, ruang digital dapat melahirkan rumor, kepanikan, dan ketidakpercayaan.

Kredibilitas institusi tidak hanya ditentukan oleh apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana menyampaikannya. Pesan awal yang jelas, konsisten, dan manusiawi bukan sekadar etika komunikasi; ia memengaruhi keputusan evakuasi, perilaku perlindungan diri, dan kesediaan publik mengikuti arahan keselamatan. Pelajaran dari kerangka aksi antisipatif patut dirujuk sebagai arah pembenahan. Chaves-Gonzalez dkk. (2022) menjelaskan konsep aksi antisipatif bertujuan untuk memastikan bantuan diberikan sebelum puncak bencana benar-benar terjadi. Jika prinsip ini dijadikan pegangan, maka pertanyaan kebijakan untuk Bencana Sumatera berubah: bukan apa yang harus dilakukan setelah bencana, melainkan aksi apa yang wajib dijalankan sebelum puncak bencana melanda.

### **Dari Reaksi ke Antisipasi**

Cara kerja pananggulangan bencana nasional patut dikoreksi, belajar dari Bencana Sumatera dan kesadaran kolektif untuk berbenah. Pertama, memperjelas informasi tanda-tanda pemicu bencana dan melembagakan protokol tindakan berbasis peringatan. Sagala dkk. (2025) memaknai aksi merespon peringatan dini sebagai tindakan terencana untuk meminimalkan kerusakan dan kerugian berdasarkan informasi peringatan dini. Peringatan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi langsung

menyalakan rangkaian tindakan yang terukur, seperti aktivasi rencana kontinjensi, pra-penempatan logistik, penguatan pos komando, dan penugasan jelas lintas sektor. Disiplin latihan, simulasi berbasis skenario, dan evaluasi pascakejadian menjadi syarat utama, agar protokol diterapkan sepenuhnya.

Kedua, mendorong peringatan lebih berorientasi dampak (timpact-based), bukan hanya bahaya (hazard-based). Publik lebih mudah bertindak ketika memahami konsekuensi konkret: ruas jalan mana berpotensi terputus, layanan dasar mana terganggu, fasilitas kesehatan mana perlu proteksi, dan kapan batas waktu aman untuk bergerak. Espejo dkk. (2025) belajar dari pengalaman penanganan siklon di Mozambik menyatakan, prediksi cuaca dan potensi dampaknya secara berkala sangat penting untuk meningkatkan kesiapan dan tindakan antisipasi yang efektif. Pola ini menjadi bagian dari transformasi dari peringatan menjadi rencana tindakan yang spesifik.

Ketiga, koreksi pola pemanfaatan ruang untuk pencegahan bencana jangka panjang. Pembelajaran Siklon Senyar pemicu bencana Sumatera seharusnya menjadi rujukan untuk memperkuat integrasi risiko iklim dalam Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang (RTRW/RDTR), audit ketahanan infrastruktur, serta pemulihan dengan standar yang lebih aman, adaptif, dan adil.

Belajar dari Bencana Sumatera patut dimaknai sebagai upaya menempatkan bencana sebagai cermin kapasitas negara dan masyarakat. Siklon Senyar memperlihatkan, data dan peringatan bisa tersedia, tetapi tanpa informasi pemicu bencana yang jelas, komunikasi yang kredibel, dan perencanaan berbasis dampak, risiko akan kembali menjadi tragedi berulang. Pelajaran ini patut kita catat dan insyafi bersama: mengubah peringatan menjadi tindakan, dan mengubah tindakan menjadi pembelajaran kelembagaan yang permanen.